Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault

Eki Karsani Apriliyadi ^{id}*, & Tommy Hendrix ^{id}

Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi (PPKMI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia

Abstrak Tujuan kajian ini untuk melihat pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai fenomena sosial yang memberikan ruang interpretasi dari masyarakat dalam ruang aksi. Artikel ini merupakan kajian dalam melihat fenomena pandemi Covid-19 yang dianalisis secara kualitatif menggunakan perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan dari Foucault. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai interpretasi dari masyarakat melibatkan tindakan nyata yang berkaitan dengan pemahaman tentang kekuasaan yang subjektif, horisontal, dan hadir dalam ruang interaksi publik yang melibatkan berbagai pihak. Melalui perspektif ini kita bisa lihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui beragam mekanisme dalam ruang interaksi yang dilihat secara horizontal. Ruang tafsir relasi kekuasaan terkait fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia memperlihatkan adanya tiga perhatian yang berbeda (relasi kekuasaan sebagai strategi, relasi kekuasaan governmentality, dan relasi kekuasaan dominasi).

Kata kunci: Pandemi Covid-19; foucault; wacana; pengetahuan; kekuasaan; pendisiplinan

Abstract This study aims to see the Covid-19 pandemic in Indonesia as a social phenomenon that provides space for interpretation from the community in action space. This article is a study in looking at the Covid-19 pandemic phenomenon, which is qualitatively analyzed using the perspective of discourse, knowledge and power from Foucault. The results show that various interpretations of society involve concrete actions related to an understanding of power that is subjective, horizontal, and present in the public interaction space involving multiple parties. From this perspective, we can see how power works through various mechanisms in the interaction space seen horizontally. The interpretation room for power relations related to the Covid-19 pandemic phenomenon in Indonesia shows that there are three different concerns (power relations as a strategy, governmental power relations, and dominance power relations).

Keywords: Covid-19 pandemic; discourse; foucault; knowledge; power; discipline

JEL Classification: Y80

* Penulis koresponden
E-mail: ekik001@lipi.go.id

PENDAHULUAN

Di penghujung akhir tahun 2019, dunia gempar karena hadirnya virus baru yang bernama Corona. Virus ini pertama kali muncul di negeri Tiongkok tepatnya di kota Wuhan Provinsi Hubei Republik Rakyat Tiongkok. Lambat laun tapi pasti virus ini menyebar ke negara-negara lain seiring dengan intensifnya mobilitas manusia di bumi ini. Kasus berkembangnya status endemi menjadi pandemi ditandai dengan makin tingginya angka penyebaran virus ini di berbagai negara. Saat ini Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kasus Covid-19 paling banyak di dunia. Sementara Indonesia merupakan negara ASEAN dengan angka kasus paling tinggi (Hidayat, 2020).

Kehadirannya tidak saja mengejutkan masyarakat umum, namun juga termasuk dunia medis dan pemerintah setiap negara. Informasi mengenai usaha upaya menghambat dan mengatasi penyebaran Covid-19 bermuara pada protokol medis yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) mengingat Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Djalante *et. al.*, 2020). Sebelumnya pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO secara resmi memasukkan penyakit dikarenakan virus corona pada manusia ini dengan nama Coronavirus Disease (Covid-19) (Safrizal *et. al.*, 2020).

Kini dunia sains yang berkaitan langsung dengan virus corona berupaya keras untuk menemukan cara melawan penyebarannya, baik itu pembuatan vaksin, maupun riset yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia yang diprediksi bakal menahan laju penyebaran virus ini. Setiap negara yang memiliki angka kasus yang terpapar Covid-19 mau tidak mau harus mengikuti langkah-langkah pencegahan berbasis protokol medis yang berskala global. Merebaknya wabah Covid-19, memaksa negara mengambil beragam kebijakan yang dianggap efektif bisa menahan laju penyebarannya. Melalui pemberitaan baik di televisi maupun internet, kita dengar berbagai negara telah menutup pintunya dalam menerima aliran manusia dari negara-negara lain terutama yang ditetapkan sebagai negara yang berstatus zona merah. Bahkan beberapa negara telah menetapkan kebijakan *lockdown* dengan memaksa warga negara agar tetap beraktivitas di rumah, tidak dibenarkan keluar kecuali keadaan memaksa. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memberlakukan *lockdown*, namun kebijakan yang diambil adalah pembatasan interaksi sosial dalam skala besar atau yang kita kenal dengan nama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Awalnya pemerintah Indonesia bersikap cuek terhadap fenomena Covid-19 yang berskala global, bahkan menganggap situasi pandemi Covid-19 sebagai peluang meraup keuntungan ekonomi dengan membuka peluang pariwisata bagi datangnya para wisatawan mancanegara ke Indonesia. Keadaan menjadi terbalik ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa terdapat warga Indonesia yang terkena Covid-19. Sontak saja berita tersebut mengejutkan semua warga Indonesia. Kasus pertama yang terkena Covid-19 menjadi titik tolak penting bagi pemerintah menyusun berbagai kebijakan untuk menghambat laju penularan Covid-19 supaya tidak tambah meluas.

Beberapa ahli telah memberikan gambaran dampak dari berlakunya kebijakan karantina wilayah adalah lumpuhnya roda perekonomian masyarakat yang sudah barang tentu bakal banyak warga masyarakat yang kehilangan aktivitas ekonominya terlebih bagi warga yang bergerak di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap atau harian. Melalui pemberitaan yang disampaikan berulang kali sebagai iklan kita dianjurkan untuk berdisiplin dalam menjaga kesehatan mulai dari sering cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika berada di luar rumah, mengganti pakaian dan mandi sehabis beraktivitas di luar, jaga jarak fisik dengan individu lain, dan anjuran-anjuran lain yang dianggap efektif dapat menahan laju penularan Covid-19.

Meski demikian ada satu kesepakatan bersama bahwa Covid-19 ini merupakan virus yang mematikan, maka seluruh individu harus menjaga diri dan menjalankan protokol kesehatan dengan tertib sesuai ketentuan. Informasi beserta seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan Covid-19 mengacu pada sumber-sumber pengetahuan yang diproduksi oleh pihak yang berwenang (pemerintah) berdasarkan wacana-wacana resmi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh WHO. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi langkah pendisiplinan diri yang saat ini masih bersifat persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut pada praktiknya sulit untuk segera dipatuhi oleh sebagian warga masyarakat. Dampak paling signifikan yang terasa oleh sebagian masyarakat adalah terganggunya roda perekonomian masyarakat, sehingga informasi tentang bahayanya Covid-19 ini tidak terlalu banyak digubris oleh sebagian masyarakat karena jika mereka betul-betul patuh melaksanakan anjuran untuk tetap ada di rumah, secara langsung mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita semua bukan hanya bagi anggota masyarakat namun juga bagi pemerintah yang harus dapat menciptakan situasi kondusif sehingga warga masyarakat patuh melaksanakan kebijakan untuk tetap di rumah.

Merebaknya pandemi Covid-19 mendorong pemerintah selaku perwakilan dari kekuasaan yang memiliki otoritas mengatur perilaku warga masyarakat dengan tujuan agar tercipta adanya kedisiplinan diri yang ditunjukkan oleh perilaku taat yang penuh dari warga masyarakat. Ketaatan, kepatuhan dan disiplin dalam menjaga diri dianggap menjadi kunci penting mencegah penyebaran Covid-19 merebak lebih luas. Realitasnya masih banyak warga yang masih beraktivitas di luar rumah dengan berbagai kepentingan, entah itu bekerja, belanja, atau berkerumun melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dan ditemukan adanya perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi seperti biasa. Di satu sisi kondisi ini dianggap sangat mengkhawatirkan, karena dalam keadaan demikian Covid-19 sangat mudah ditularkan. Pemerintah menganggap tidak ada pilihan lain yang dianggap paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19 selain setiap individu harus lebih banyak tetap berada di rumah, meski bagi sebagian masyarakat tertentu dirasa berat untuk melakukannya. Pemberlakuan tidak berlangsung lama namun angka kasus COVID 19 meningkat tajam. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus mengambil tindakan hukum yaitu menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro (Handoko et al, 2021). pemerintah

mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas (Dewi, 2020). Warga masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari Covid-19, dan mengurangi aktivitas sosial di luar rumah bila tidak ada kepentingan tertentu yang mendesak.

Pemberlakuan PSBB tentunya sudah melewati proses pertimbangan yang matang dengan memikirkan banyak hal. Satu yang pasti adalah pemberian jaminan sosial (bantuan sosial) bagi warga masyarakat yang terdampak secara langsung dengan adanya pemberlakuan PSBB ini. Bagi masyarakat itu sendiri kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan yang ditunjukkan perlu dibarengi dengan adanya jaminan kenyamanan dalam menjalankan anjuran kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 ini. Setelah pemberlakuan PSBB selesai, kini masyarakat Indonesia masuk ke skenario *New Normal* atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa skenario *New Normal* masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Pemberlakuan skenario *New Normal* masih tarik ulur yang tercermin dari rencana pembukaan kembali pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta. Berbagai persiapan skenario *New Normal* dilakukan pemerintah meski sejumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut (Margianto, 2020). Pemerintah seharusnya melihat kesiapan dari berbagai sisi baik dari kesiapan sosial, ekonomi, dan kesiapan masing-masing daerah. Dalam beberapa hal pemerintah telah menyiapkan protokol kesehatan yang mengatur protokol di tempat bekerja, aturan bagi para pekerja, sampai koordinasi antara tempat bekerja dan pemerintah daerah. Di sektor industri juga sudah ada edaran terkait dengan kawasan industri, pekerja dan panduan *social distancing* (Asmara, 2020).

Dalam hal ini penulis ingin menghadirkan bahwa fenomena global pandemi Covid-19 sebagai wacana, pengetahuan dan kekuasaan dalam perspektif Foucault. Teorinya tentang relasi antara wacana, pengetahuan dan kekuasaan banyak dikaji oleh berbagai kalangan akademisi. Teori ini banyak mempengaruhi para akademisi sehingga banyak yang kemudian membahas tentang konsep kuasa yang dihubungkan dengan berbagai hal. Teori ini yang di kemudian hari dikembangkan oleh para pakar modern menjadi analisis wacana dalam teori sosial.

Kajian ini disusun berdasarkan tinjauan literatur karya-karya Foucault, hasil karya para teoretisi yang mengelaborasi pemikiran dan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan Foucault. Dari upaya tersebut diperoleh cara pandang sistemik Foucault terkait kekuasaan. Begitu juga dengan kajian ini pendekatan Foucault tentang kekuasaan menjadi titik berangkat dalam melihat fenomena mewabahnya Covid-19 yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan dari pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian dalam melihat realitas sosial pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pemberitaan dan informasi tentang fenomena covid-19 melalui media internet menjadi bahan “lapangan” yang ditampilkan sebagai data sekunder dengan metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka.

Artikel ini termasuk ke dalam kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan dari penelusuran dan studi atas pustaka tanpa mengkaji ke lokasi penelitian dan bertemu dengan responden. Keseluruhan data dan fenomena bersumber dari kepustakaan atau dokumen yang tersedia. Studi ini bersifat kualitatif dan dianalisis secara deskriptif.

Kajian ini disusun berdasarkan penelusuran literatur karya-karya Foucault, hasil karya para teoretisi yang mengelaborasi pemikiran dan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan Foucault. Dari upaya tersebut diperoleh cara pandang sistemik Foucault terkait kekuasaan. Pendekatan Foucault tentang kekuasaan menjadi titik berangkat dalam melihat fenomena mewabahnya Covid-19 yang telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan mencegah penyebaran wabah covid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi wacana

Realitas dapat dibentuk dan diproduksi melalui berbagai wacana yang saling mendukung (Priyanto, 2017). Foucault mengemukakan pengertian wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur terkait dengan aturan dan praktik yang menghasilkan pernyataan bermakna pada satu rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, wacana erat hubungannya dengan kekuasaan.

Wacana-wacana yang diproduksi itu membentuk pemahaman umum yang disukai khalayak. Konstruksi dari wacana membatasi perspektif kita tentang sesuatu, akibatnya pemahaman umum saling melengkapi didiseminasikan dalam berbagai aspek pengetahuan yang saling melengkapi dapat menggambarkan realitas yang diterima oleh publik. Struktur diskursif menentukan pandangan kita tentang suatu objek tertentu dalam batasan-batasan tertentu. Batasan bidang wacana dapat menentukan pandangan kita terkait realitas sesuatu. Kita menerima realitas yang dibentuk oleh struktur wacana melalui serangkaian perspektif. Definisi mengenai suatu objek diterjemahkan dibatasi oleh suatu praktik wacana (Eriyanto, 2003). Misalkan wacana terkait iklan memberikan perspektif tertentu pada sebuah objek (produk). Pembaca diarahkan kepada wacana tertentu yang telah ditentukan oleh pembuat iklannya. Akhirnya pandangan kita mengenai sebuah produk menimbulkan realitas yang hinggap ke dalam pikiran kita. Struktur diskursif pada sebuah wacana iklan tidaklah memberikan semua informasi tentang sebuah produk secara menyeluruh. Pembatasan tersebut memiliki tujuan untuk mengarahkan cara pandang pembaca sehingga memformulasikan suatu realitas tertentu dalam pikiran

yang mengarahkan pembaca untuk tertarik dan mengkonsumsi produk tersebut (Priyanto, 2017).

Produksi wacana atau penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran tidak dapat lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi, seleksi, dan kontrol (pengendalian) dari sekian banyak formasi yang non diskursif. Poin pentingnya adalah bahwa diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mengendalikannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault sendiri bahwa ada empat ranah ketika diskursus dianggap membahayakan, yaitu: politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu (Umanailo, 2019).

Pengetahuan dan kekuasaan

Pemikiran Foucault sangat dipengaruhi oleh Nietzsche, sebagaimana hal tersebut tampak pada karya-karyanya. Konsep tentang kekuasaan inilah yang selanjutnya menjadi fokus pemikiran Foucault. Pengetahuan dalam arkeologinya itu sendiri menurut Foucault terkait dengan segala yang yang bisa diucapkan oleh seseorang dalam suatu praktek diskursif dan tidak bisa dispesifikasikan oleh kenyataan tersebut. Ia merupakan satu ruang yang mana subyek dapat menempati satu posisi dan berbicara mengenai obyek-obyek yang dikenalnya dalam diskursus. Ia pun merupakan wilayah koordinasi dan subordinasi pernyataan-pernyataan di mana konsep tampak, didefinisikan, diaplikasikan, dan ditransformasikan. Pengetahuan sangat ditentukan oleh kemungkinan pemakaian dan penyesuaian yang diberikan oleh diskursus. Dalam konteks tersebut terdapat bangunan-bangunan pengetahuan yang tidak terikat dengan sains, tetapi tidak ada pengetahuan yang tidak mempunyai praktik-praktik diskursif partikular, dan praktek diskursif apapun dapat didefinisikan oleh pengetahuan yang dibentuknya (Umanailo, 2019).

Sementara kekuasaan dalam perspektif Foucault berbeda dengan konsep kekuasaan pada umumnya baik konsep kekuasaannya Marxian maupun Weberian. Bagi Foucault kekuasaan bukanlah kepunyaan para raja, penguasa atau pemerintah. Tidak terkoneksi dengan kepemilikan, sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang pegang oleh sekelompok masyarakat dan yang kapan saja bisa hilang (Kamahi, 2017). Kekuasaan menurut Foucault bukanlah cerminan dari kelas borjuis maupun elite penguasa beserta atributnya, tetapi ia merupakan strategi yang diakibatkan oleh fungsi (disposisi, manuver, taktik dan teknik). Kekuasaan pun bukanlah berasal dari ekonomi ataupun politik karena memang tidak ada dasarnya, kekuasaan hadir sebagai jaringan kompleks yang tidak terbatas dari kekuasaan mikro yang ada pada setiap aspek sosial (Wijaya, 2012).

Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari sekelompok pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan tidak hadir sebagai dominasi dari suatu kelas yang memiliki penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), dan bukan pula dimiliki atas suatu kharisma (Weber). Dalam hal ini kekuasaan tidak dipahami secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan tidak dilihat sebagai institusi atau struktur, dan bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan

merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis (Kamahi, 2017).

Perspektif kekuasaan Foucault tentang kekuasaan pun terlihat dari pemaknaannya mengenai kekuasaan sebagai situasi strategis yang senantiasa berada dalam hubungan-hubungan kekuasaan. Hubungan-hubungan tersebut bisa ditentukan oleh perbedaan ekonomi, politik, dan bahasa. Akhirnya dinamika hubungan kekuasaan tersebut mengubah, memperkuat, atau membalikkan hubungan-hubungan tersebut melalui perjuangan dan pertarungan terus menerus. Dalam titik tertentu ragam hubungan kekuasaan tersebut dapat mendorong lahirnya bentuk-bentuk konflik dalam berbagai institusi sosial, dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan itu tidak terlepas dari konflik yang melibatkan berbagai pihak. Kerangka pemikiran Foucault tentang kekuasaan menyediakan pemahaman bahwa kekuasaan itu sendiri tidak lepas dari konflik dan perlawanan sebagaimana yang ditegaskan oleh Foucault bahwa untuk memahami tentang kekuasaan yang pertama harus dipahami adalah adanya beragam hubungan-hubungan kekuasaan yang melekat pada bidang organisasi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Maring, 2010).

Kekuasaan dijalankan dengan serangkaian peraturan tertentu yang saling mempengaruhi. Kekuasaan menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain. Kekuasaan tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Ia menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Lebih jauh lagi Foucault menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Menurutnya, kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan menyediakan, jadi tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan (Maring, 2010; Priyanto, 2017).

Kekuasaan dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai alat untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran. Kekuasaan dalam masa modern mengalami pola normalisasi yang mana kekuasaan disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Ia dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara (Barthen, 2001).

Lebih lanjut Foucault (1980 dalam Maring; 2010), melihat kekuasaan berhubungan dengan strategi yang dijalankan pihak tertentu yang bertujuan untuk mendorong pihak lain untuk patuh atau taat, atau mendorong pihak lain tunduk, atau membuat pihak lain memberi dukungan terhadap pihak tertentu tersebut. Penekanan kekuasaan berdasarkan perspektif Foucault:

1. Kekuasaan itu selalu ada dalam relasi. Kekuasaan dalam realitasnya berarti sejumlah hubungan yang bersifat teratur, hirarkis dan dikoordinasikan. Dengan melihat kekuasaan yang selalu ada dalam hubungan-hubungan yang bersifat

teratur dan dikoordinasikan maka masalah yang harus dilakukan adalah menyediakan jalinan analisis yang dapat mengungkapkan bagaimana kekuasaan itu bekerja, bukan mengangkat teori kekuasaan. Tekanannya adalah pada beragamnya relasi kekuasaan;

2. Relasi kekuasaan selalu terlihat dalam struktur tindakan yang mendorong pihak lain melalui rangsangan, persuasi, atau bisa juga melalui paksaan dan larangan. Dalam hal ini analisis kekuasaan Foucault memberi perhatian terhadap strategi dan mekanisme untuk merealisasikan tujuan;
3. Kekuasaan itu bekerja pada berbagai tingkatan, tidak terpusat, dan tersebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi. Ia diproduksi dan direproduksi terus menerus. Kekuasaan tidak selalu dilihat sebagai hubungan antara kekuasaan dan negara, atau yang datang dari satu arah, atau selalu datang dari atas ke bawah. Dengan demikian syarat-syarat kemungkinan pemahaman kekuasaan tidak terpusat pada satu sumber. Namun pada tingkat tertentu (mikro) ketika hubungan kekuasaan tidak sebanding maka ada arah kekuasaan yang datang dari atas atau dari pihak yang merasa lebih kuat atau mempunyai pengaruh.

Foucault sendiri tidak serta merta menolak konsep otoritas sebagai salah satu sumber kekuasaan yang ada dan dipraktikkan oleh pihak tertentu. Namun Foucault mengkritik kelemahan analisis kekuasaan yang hanya memandang otoritas sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang beroperasi. Bila otoritas dipandang sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang beroperasi maka gerakan-gerakan dalam arah yang berlawanan tidak dapat diketahui atau ditelusuri. Meski kecil arah gerakannya, tetapi hal tersebut merupakan strategi yang terkoordinasi dan merupakan hubungan-hubungan atau relasi kekuasaan yang dapat menghasilkan dampak-dampak baru dan dapat berkembang lebih lanjut (Foucault, 1980 dalam Maring, 2010).

Foucault pun memandang pengetahuan sebagai wacana yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Kekuasaan tersebut tidak muncul namun bekerja dalam sistem organisasi itu sendiri. Pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi pengetahuan itu bersifat politis. Melalui pengetahuan kegiatan dan kehidupan diatur dengan aturan-aturan tertentu. Pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warganya bertindak dan bertingkah laku atau membatasi hal-hal tertentu. Pengetahuan tersebut bisa diwujudkan dengan cerita, konsep kepercayaan dan sebagainya (Maring, 2010).

Praktik pendisiplinan dapat dilakukan dengan kontrol pengetahuan/wacana. Praktik tersebut dalam masyarakat modern tidak harus melalui cara fisik. Sistem regulasi seperti jadwal, peraturan, prosedur kegiatan, pelaksanaan, *punish and reward* (hukuman dan penghargaan) dapat menjadi kontrol tanpa disadari oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Foucault lebih menekankan mekanisme kekuasaan tentang pendisiplinan dan kepatuhan yang mampu bekerja memengaruhi bagian terdalam dari individu, menyentuh tubuh mereka, merasuk ke dalam tindakan, tingkah laku, wacana, proses belajar dan dalam kehidupan sehari-

hari (Foucault, 2002 dan Maring 2010). Penggambaran tentang pendisiplinan tubuh dan hukuman sebagai metafora kekuasaan dengan melihat bagaimana pendisiplinan dan hukuman itu bekerja di penjara. Sebagai mana yang disinggung oleh Frank (1998)

"In the great work Discipline and punish, Foucault's central metaphor for power was the panopticon - a prison design that allowed an unseen guard to exercise perpetual surveillance of each cell. In the architecture of the panopticon Foucault began to appreciate how power operates through those micro-strategies that turn the self, here a prisoner, into its own agent of disciplinary practices".

Sebagai mana Foucault menulis tentang *panopticon* (penjara)

"He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes bility for the constraints of power; he makes them play spontaneously himself, he inscribes in himself the power relation in which he plays both roles; he becomes the principle of his own subjection (Frank, 1988).

Foucault berpikiran bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19 dengan ciri kekuasaan pada saat itu cenderung brutal, dioperasikan secara kontinyu, menekankan aspek ketaatan pada tata cara tertentu dan penuh dengan simbolisme dan kekuasaan itu berada di ruang publik (Susanto, 2020). Kekuasaan ada di mana-mana dan bukan milik siapa-siapa, kekuasaan itu merupakan strategi. Kekuasaan terjadi sebagai praktik dalam suatu ruang lingkup tertentu, terdapat banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan cenderung senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan regulasi dan ia tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi (Aur, 2005). Lebih lanjut Hannigan dalam *Environmental Sociology, Second Edition*, memberikan penjelasan terkait perbedaan konseptual konsep kekuasaan Foucault dengan konsep dominasi Marxian (Mudhoffir, 2011). Menurutny:

... power may be everywhere but relationship of power are rarely asymmetrical and wholly democratic. Foucault makes an important distinction between power and domination. The latter refers to asymmetrical relationships of power in which the subordinated party has a negligible chance of exercising his or her will. Whereas power relationships are often unstable and reversible, domination means that these relationships are less fluid and less negotiation".

Dari hal di atas kita peroleh gambaran bahwa ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika melihat bagaimana kekuasaan itu bekerja: melalui mekanisme relasi kekuasaan ataukah relasi dominasi. Mudhoffir (2011), memposisikan relasi kekuasaan (*governmentality*) sebagai praktik kekuasaan yang potensial dalam diri subjek sehingga memiliki kapasitas pengendalian diri yang membentuk dan menghasilkan terbukanya kemungkinan pilihan tindakan subjek, maka cara-cara

kekerasan dan konsensual pun berlangsung. Penggunaan kekerasan dan model konsensual telah direformulasi menjadi elemen pengendalian antarindividu dalam relasi sosial.

Relasi kekuasaan (*governmentality*) menciptakan situasi di mana individu merasa bebas, ia tidak merasa terpaksa atau beranggapan bahwa tidak ada alternatif tindakan kecuali yang telah ditentukan oleh kelompok dominan, melainkan dalam diri subjek terdapat kontrol diri atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki oleh kepentingan politik-ekonomi negara. Istilah *Goverementality* yang digunakan Foucault (1982) biasa juga disebut juga sebagai *conduct of conduct*, yakni suatu relasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat pengandaian hadirnya kebebasan tetapi sekaligus mengarahkan. Ini artinya model relasi kekuasaan (*govermentality*) ini bersifat mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi pilihan tindakan tertentu dari tindakan yang lain. Lebih jauh Foucault menganggap bahwa relasi kekuasaan kini makin dipengaruhi dan terus-menerus berada di bawah kontrol negara. Itulah sebabnya mengapa Foucault mengistilahkan model relasi kekuasaan ini sebagai *governmentality* karena relasi kekuasaan makin digovernmentalisasi (*governmentalized*).

Sedangkan relasi dominasi Foucault (1982) mengandaikan ia sebagai bentuk dari relasi kekuasaan yang stabil, hirarkis, tetap, dan sulit untuk dipertahankan. Ia hadir dalam situasi di mana relasi antar-subjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Ia merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau dalam menentukan pilihan suatu tindakan (Mudhoffir, 2011). Dalam relasi dominasi subjek subordinat tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan, ini artinya pilihan yang diambil subjek sangat terbatas.

Terdapat satu model relasi kekuasaan lainnya dalam melihat perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi, yakni relasi kekuasaan sebagai *strategic games between liberties*. Bekerjanya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau eksploitasi ekonomi. Namun kekuasaan dalam model ini tidak berarti bahwa ia bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari relasi kekuasaan itu. Relasi kekuasaan model ini dapat kita lihat pada upaya-upaya pemberdayaan atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu supaya mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan (Foucault 1982 dalam Mudhoffir, 2011). Dengan demikian terdapat tiga level analisis kekuasaan, yaitu yang dipahami sebagai relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi (yang biasanya disebut sebagai kekuasaan).

Fenomena pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan foucault

Semenjak kasus Covid-19 ada di Indonesia dan penetapan status sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah Indonesia langsung menanggapi dengan serius salah satunya dengan membentuk satuan tugas yang langsung menangani pandemi Covid-19. Berbagai wacana diproduksi berdasarkan protokol medis mulai dari pentingnya menjaga kesehatan tubuh

melalui pembiasaan mencuci tangan dengan *hand sanitizer* atau sabun, mandi sehabis bepergian dari luar sampai himbauan untuk melaksanakan jaga jarak yang kita kenal dengan istilah *social/physical distancing*. Awalnya himbauan tersebut bersifat persuasif berupa anjuran yang mendorong pendisiplinan tubuh melalui serangkaian tindakan kesehatan yang dianggap dapat mengurangi terpaan Covid-19. Implikasi dari himbauan tersebut melahirkan kebijakan untuk bekerja dari rumah (*Work from home*), belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Wacana tentang pentingnya menjaga jarak diterjemahkan dengan berbagai pelarangan aktivitas warga di luar rumah. Meski demikian pelaksanaan kebijakan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagi sebagian warga masyarakat yang berpenghasilan harian, dan mereka yang bekerja di sektor informal kebijakan tersebut menjadi bencana lanjutan di samping pandemi Covid-19 itu sendiri yang dianggap sebagai bencana global. Dalam konteks ini pelbagai wacana diproduksi berdasarkan pengetahuan yang diproduksi oleh para ahli medis bahwasanya penularan Covid-19 bisa melalui beragam media, baik melalui benda-benda ataupun perpindahan melalui cipratan air liur yang bisa ditransfer ketika terjadi kontak atau interaksi secara langsung orang per orang. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu dasar pembentukan wacana tentang *social/physical distancing* yang berimplikasi pada lahirnya aktivitas kerja di rumah, belajar dan berdoa di rumah.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah warga yang terkena Covid-19, kinerja pemerintah semakin dituntut untuk lebih serius dalam penanganan penyebaran. Situasi ini mendorong lahirnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sebagai penerjemahan pentingnya melakukan karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 tambah meluas. Indonesia tidak menerapkan kebijakan *lockdown*, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Cina. Wacana PSBB diangkat ke level yang lebih tinggi penerapannya diiringi oleh beberapa tindak yang mesti dipatuhi oleh warga masyarakat. Pengaturannya tidak hanya menyangkut pentingnya tetap di rumah, namun juga mengatur tentang teknis terkait mekanisme beraktivitas di luar rumah semisal pengaturan jarak antarpemumpang di dalam mobil, atau tidak diperbolehkannya pergi berdua/berboncengan menggunakan sepeda motor kecuali memiliki KTP beralamat sama, dan larangan melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang (berkerumun). Lebih dari itu ada sanksi tegas terkait pelanggaran yang dilakukan.

Di tengah pelaksanaan ibadah puasa di bulan ramadhan pemerintah mengeluarkan larangan pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid (shalat tarawih, shalat jumat dan ibadah-ibadah lainnya). Kebijakan ini berlanjut dengan larangan mudik bagi para warga menjelang lebaran tiba, meski saat ini terjadi pelanggaran kebijakan yang disebut relaksasi di mana bandara dan sarana-sarana transportasi mulai dibuka namun dengan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam hal ini wacana terus diproduksi, direproduksi, direvisi menyesuaikan situasi penyebaran pandemi Covid-19 ini. Meski demikian apakah berbagai kebijakan tersebut mendorong warga masyarakat itu patuh, tertib dan mau melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara disiplin?. Tampaknya harapan para

penggagas wacana tersebut tidak diambut baik di level praktis. Terlihat masih banyak warga masyarakat yang mondar-mandir di jalanan, masih tampak kerumunan orang-orang di pinggir jalan terlebih. Apakah kebijakan ini tidak memiliki kewibawaan di mata masyarakat. Ujung-ujungnya pendisiplinan tubuh untuk mengikuti berbagai anjuran kebijakan kembali kepada bagaimana warga menerjemahkan, melembagakan wacana tersebut ke dalam tindak pribadi secara nyata. Harapan pemerintah supaya warganya disiplin dan mau melaksanakan aturan tersebut belum menemui titik maksimal. Dalam hal ini terlihat bagaimana kekuasaan itu bekerja. Seperti pandangan Foucault kekuasaan itu bukan menyangkut kepemilikan sumber daya (kuasa) atau yang secara kewenangan memiliki seperangkat aturan hukum yang menyertainya. Kekuasaan terealisasi dalam ruang interaksi antarberbagai elemen yang hidup dalam ruang kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini ada sebagian warga yang dengan disiplin menjalankan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, di sisi lain ada juga warga masyarakat yang resisten terhadap aturan-aturan tersebut.

Untuk itu penting kiranya melihat konteks bagaimana wacana, pengetahuan yang dibangun, melahirkan pendisiplinan tubuh sebagai wujud kepatuhan warga sebagai respon positif dari warga masyarakat. Respon tersebut terlihat melalui proses negosiasi di ruang interaksi antarelemen baik dari sumber yang melahirkan wacana yang menginginkan kepatuhan maupun dengan elemen masyarakat yang menafsirkan wacana dan pengetahuan tersebut kemudian akan bersikap memilih bergantung kepada kepentingannya. Menyadari hal tersebut pemerintah selalu dan selalu mereproduksi disertai sosialisasi dan pelebagaan wacana dan pengetahuan tersebut agar menjadi pijakan dalam bertindak di tengah pandemi Covid-19 ini. Di tengah situasi tersebut, sentra produksi wacana dari pemerintah pusat mengalami pemekaran dan penafsiran oleh tiap-tiap pemerintah daerah yang mana aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pun beragam.

Kurangnya koordinasi yang sinergis antarelemen pemerintahan akhirnya berimplikasi pada sikap mendua di kalangan masyarakat, antara mau berdisiplin menjalankan segala aturan yang diterapkan pemerintah dengan sikap melanggar semua aturan yang telah ditetapkan meski ini pun didukung oleh situasi penerapan kebijakan yang simpang siur. Sehingga tidak heran lahirnya wacana-wacana tersebut bersifat multi tafsir atau “suka-suka” tergantung kemauan, tujuan atau kepentingan yang menyertainya dan saling mempertentangkan (dualisme) dan tidak saling melengkapi (dualitas). Asumsi yang mengatakan bahwa faktor ekonomilah yang melandasi sikap warga tidak patuh aturan untuk “tetap di rumah”, mereka masih tetap berkeliaran “di jalanan”. Pernyataan itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Realitasnya warga yang masih banyak melakukan aktivitas di luar rumah baik mencari nafkah atau hanya sekedar jalan-jalan atau berkunjung ke teman atau kerabat memperlihatkan ada faktor lain selain ekonomi yang mendorong mereka berkeliaran di luar. Bisa jadi pula sikap warga yang demikian merupakan cerminan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak saling terkoordinasi. Lalu di mana letak kepatuhan dari warga sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan-kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di awal?

Lahirnya sikap yang ambigu dari masyarakat dan pemerintah diaktualisasikan dalam ruang relasi yang interaktif. Hal ini sejalan dengan pengertian kekuasaan itu lebih memuat strategi-strategi yang dikembangkan oleh berbagai elemen sebagai satuan sosial dalam ruang hidup yang nyata ketika mereka menerjemahkan dan mengaktualisasikan dari beragam wacana dan pengetahuan tentang Covid-19 sesuai dengan irama hubungan sosial itu sendiri. Di sini terlihat bagaimana Foucault melihat kekuasaan berdimensi operasional (bagaimana kekuasaan itu bekerja) yang bersifat subyektif hidup dalam ruang relasi sosial.

Proses pendisiplinan tubuh melalui serangkaian tindak nyata terkait operasional medis secara individual dan komunal melalui beragam aksi seperti yang kita dengar, lihat dan konsumsi melalui beragam media dalam satu sisi justru tidak melahirkan kepatuhan tubuh itu sendiri sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19. Wacana awal sifat dasar Covid-19 yang secara alamiah terkait dengan masalah medis kemudian pembahasannya berkembang melalui beragam aspek yang menyertainya baik aspek sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Berbagai kalangan baik dari pejabat pemerintah, praktisi sosial ekonomi, akademisi, budayawan, tenaga medis dan lain-lain banyak yang melakukan pembahasan pandemi Covid-19 dari berbagai sudut pandang. Di tengah situasi *Work from Home* (WFH) pembahasannya dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi yang tersedia di internet dengan tujuan yang hampir sama yaitu melawan Covid-19 dengan berbagai cara termasuk bagaimana cara mengatasi dampak sosial ekonomi budaya yang ditimbulkannya.

Kehadiran pandemi Covid-19 di satu sisi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat global saat ini. Nilai-nilai sosial budaya telah mengalami transformasi yang demikian cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pandemi Covid-19 telah memaksa warga dunia mereformasi tatanan nilai sosial budaya supaya bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan hidup masyarakat di tengah merebaknya pandemi Covid-19 ini. Setidaknya situasi ini telah mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya hidup sehat dan kepedulian terhadap sesama, meski kepedulian ini diaktualisasikan dengan bentuk yang berbeda dengan sebelumnya. Peduli sesama diterjemahkan dengan tidak melakukan kontak fisik, kebiasaan silaturahmi tidak lagi dilakukan secara langsung melalui kehadiran fisik di satu tempat yang sama. Justru rasa peduli itu dilakukan dengan cara menjauhinya dulu. Tentunya perlu usaha yang kuat untuk membalikan situasi yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Satu yang pasti kepedulian untuk berbagi dengan pihak yang terdampak cukup serius semisal mereka yang kehilangan sumber mata pencaharian menjadi nilai penting yang menjadi kesadaran komunal. Sehingga pemberlakuan PSBB, *lockdown* (karantina wilayah) perlu didukung adanya jaminan sosial yang kuat yang dianggap sebagai salah satu strategi dalam melahirkan kepatuhan masyarakat, meski pada tataran praktis kesadaran pemberian bantuan dalam membangun situasi jaminan sosial yang kuat tidak berjalan dengan cepat, masih banyak kendala-kendala tertentu yang melingkupinya. Sebagian masyarakat menganggap pemerintahlah yang mesti hadir di depan untuk mengatasi dampak nyata yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini. Ketika bantuan itu dianggap “telat” karena

masih banyak warga masyarakat yang terdampak langsung yang masih belum memperoleh bantuan, kewibawaan pemerintah justru dipertaruhkan. Ketika wacana-wacana tentang pentingnya untuk tetap di rumah, bekerja dan melakukan berbagai aktivitas di rumah terus dikampanyekan di berbagai ruang pemberitaan, di ruang nyata masyarakat menganggap hal tersebut hanyalah wacana-wacana yang minim substansi. Akhirnya apa yang terjadi masyarakat masih terlihat berkerumun, masih tidak mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang terus disosialisasikan bak iklan. Cara pandang yang berbeda melahirkan strategi penerjemahan pengertian kekuasaan dalam ruang nyata yang tidak tersangkut dengan pengertian kekuasaan yang terkait dengan kepemilikan sumber daya kekuasaan itu sendiri. Pengetahuan terkait pandemi Covid-19 yang lahir pun otomatis menjadi beragam terlepas bagaimana cara mereka menerjemahkannya.

Situasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia berkembang seiring dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang harus ditangani secara serius. Kini pemerintah menerapkan kebijakan *New Normal* sebagai bentuk adaptasi masyarakat supaya dapat hidup di tengah-tengah ancaman pandemi Covid-19 dengan tetap mengindahkan protokol medis yang sudah disosialisasikan secara terus menerus ketika pandemi Covid-19 ini melanda Indonesia. Tentunya rencana tersebut penting dipersiapkan secara matang dari berbagai aspek kehidupan.

Pemberlakuan kebijakan baru dengan menerapkan skenario *New Normal* di tengah-tengah masyarakat tentunya melewati proses pemaknaan dan tindakan yang beragam dari berbagai pihak. Tujuan dari pemerintah supaya ada kepatuhan dari masyarakat tanpa kecuali dengan mengindahkan protokol-protokol hidup sehat sebagai wacana dan pengetahuan yang terus menerus diproduksi dan direproduksi. Dengan kacamata Foucault, meski tujuan kekuasaan dalam hal tertentu adalah untuk melahirkan kepatuhan dari pihak masyarakat secara menyeluruh, tetapi sebagai kekuasaan yang beroperasi di ruang relasi maka terlihat adanya pertentangan-pertentangan tertentu yang ditindakan oleh pihak-pihak lain. Dalam masyarakat pun terlihat cara pandang dan cara aksi yang berbeda pula. Sebelum skenario *New Normal* diberlakukan tindakan masyarakat pun sudah memperlihatkan pertentangan-pertentangan atau resistensi terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya (PSBB yang menahan orang untuk lebih banyak diam di rumah). Normalisasi yang dapat melahirkan kepatuhan nantinya perlu dinegosiasikan di ruang publik dengan penekanan tindak aksi yang lebih relevan dan ril dengan mengingat seberapa siapkah semuanya menerima itu dan bernegosiasi di ruang publik sebagai ranah dialog yang nyata melalui tindakan yang terwujudkan.

Tindak penanggulangan dari pemerintah yang nota bene dianggap memiliki seperangkat pengetahuan sebagai sumber tindak kebijakan dalam aktualisasi kekuasaan yang ditransmikan ke pihak lain (warga masyarakat) dengan terlebih dulu mengalami resistensi di ruang publik dari pihak lain tersebut meski dasar pembenaran tindakannya didasari pengetahuan yang spekulatif. Di sinilah jalin berkelindannya interaksi kekuasaan antaraktor atau elemen sosial yang merasa memiliki pengetahuan berbasis wacana yang terus mengalami produksi dan

reproduksi terlepas dari benar ataukah tidak landasan pengetahuan tersebut, terlebih di tengah situasi mobilitas informasi yang wara-wiri tanpa batas melalui jejaring media sosial berbasis internet menambah makin banyak pengetahuan yang diadopsi dan dijadikan landasan tindakan terlepas berita tersebut hoaks atau bukan.

Dalam tataran tertentu pun, kebijakan pemerintah pusat tidak dengan sendirinya mendapat respon yang searah dari pemerintah daerah sehubungan dengan adanya cara pandang dalam melihat realitas yang nampak. Cara pandang terhadap situasi yang dihadapi berangkat dari kepentingan yang menjadi pengikat dan tujuan yang ingin dicapai. Tentunya hal ini mengindikasikan kurangnya koordinasi secara sinergis di antara aktor di pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada kegamangan dan kebingungan di masyarakat dan bisa bertindak di luar seperti yang diharapkan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Dengan menggunakan cara pandang Foucault ini, dapat dilihat bagaimana mekanisme kekuasaan itu bekerja tanpa harus terikat secara ketat kepada sumber kekuasaan yang bagi sebagian kalangan dianggap sebagai kepemilikan (pendekatan kekuasaannya Marxian dan Weberian). Realitanya fenomena pandemi Covid-19 telah banyak mengubah tatanan nilai dan tindak masyarakat bersifat multidimensi yang bisa ditelisik melalui perspektif kekuasaan.

Beranjak dari paparan di atas maka ruang analisis kekuasaan dalam melihat tindak subjektif masyarakat (subjek) dalam menyikapi hadirnya pandemi covid -19 terangkai dalam tiga model analisis kekuasaan yaitu relasi strategi, relasi kekuasaan (*governmentality*), dan relasi dominasi yang mana dalam menjalankan kekuasaan negara melalui perangkat institusi (*apparatus*) hadir sebagai pihak yang berhadapan dengan masyarakat dalam derajat yang berbeda. Kekuasaan sebagai relasi strategi negara hadir memproduksi wacana, internalisasi pengetahuan yang dilakukan secara terus menerus mendorong kesadaran (masyarakat) atau “memaksa” subjek (masyarakat) dengan kebebasan dalam mengambil keputusan tindakannya sendiri. Dalam model *governmentality* subjek (masyarakat) memiliki kebebasan atau memiliki kemungkinan banyaknya pilihan tindakan, meski dalam tataran tertentu subjek (masyarakat) diarahkan untuk mengambil tindakan yang dikehendaki negara (tetap disiplin dalam menjalankan protokol medis, dan sesuai kebijakan yang terkait penanggulangan pandemi Covid-19 ini). Dalam model ini berarti pilihan tindakan tertentu dibentuk, diatur, dan dikonstruksi sesuai dengan situasi wabah pandemi Covid-19 ini yang makin merajalela. Meski sekarang telah berlaku era *New Normal*, yang mana fasilitas-fasilitas publik, tempat-tempat bekerja telah kembali dibuka, pilihan tindakan subjek (masyarakat) diatur, dikonstruksi dengan harapan kebebasan yang dimiliki subjek (masyarakat) tetap sejalan dengan kebijakan negara. Menurut Mudhoffir (2011) penggunaan aparatus *governmentality* dalam mengendalikan tubuh sosial pun memanfaatkan fungsi wacana dan produksi pengetahuan, meski bentuk pengetahuannya tidak diproduksi melalui definisi ilmiah dan klaim kebenaran, tetapi berdasarkan kepentingan politik-ekonomi. Itu juga mungkin yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal* di tengah situasi jumlah yang terpar Covid-19 justru meningkat. Melemahnya sektor produktif

ekonomi masyarakat akibat kebijakan PSBB menjadi salah satu faktor pendorong pemberlakuan kebijakan *New Normal*.

Kekuasaan sebagai relasi dominasi cenderung memposisikan subjek (masyarakat) sebagai pihak yang terdominasi pihak lain dalam hal ini negara, yang mana subjek tidak banyak memiliki banyak pilihan tindakan tertentu. Mudhoffir (2011) menggambarkan bahwa relasi kekuasaan ini bekerja dengan memanfaatkan fungsi wacana sebagai rezim kebenaran, dan menggunakan apparatus disiplin dalam normalisasi praktik sosial subjek. Bentuk pendisiplinan tubuh subjek (masyarakat) merupakan relasi dominasi. Dalam konteks ini terdapat aktor dominan yang terus memproduksi wacana menjadi pengetahuan yang valid atau *legitimate* dalam menjelaskan realitas, kemudian pengetahuan tersebut diinternalisasikan oleh individu supaya bersikap sesuai dengan kehendak aktor dominan tersebut. Kepentingan aktor dominan menjadi rasionalitas atas tubuh yang disiplin. Praktik pendisiplinan dioperasikan sebagai aparatus kekuasaan terhadap tubuh individu sebagai sasarannya. Wacana-wacana tentang pandemi Covid-19 yang diproduksi oleh lembaga-lembaga yang dianggap kompeten sebagai apparatus negara (aktor dominan) menjadi pengetahuan yang dianggap *valid/legitimate* dan menjadi dasar pendisiplinan tubuh individu dalam berperilaku di tengah realitas sosialnya. Individu/masyarakat yang ter subordinasi-tidak memiliki dasar pengetahuan mumpuni tentang Covid-19 tunduk dan melakukan serangkaian protokol medis sesuai dengan himbauan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 ini. Dalam praktiknya apparatus negara berwenang melakukan tindakan paksa bagi warga yang tidak disiplin menerapkan protokol medis ini.

KESIMPULAN

Fenomena pandemi Covid-19 menjadi “momok” yang menggelisahkan sebagian besar masyarakat global. Berbagai upaya yang dianggap strategis ditindakan dan dijadikan kebijakan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 termasuk tindak kebijakan dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkannya terhadap tatanan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semudah membalikkan tangan. Wacana dan pengetahuan yang ditransmisikan untuk dijadikan dasar tindak warga masyarakat sebagai wujud kepatuhan melalui pendisiplinan tubuh tidak berjalan seiring sejalan dengan maksud yang diinginkan.

Hilir mudiknya berbagai info sebagai sumber pengetahuan masyarakat terlepas benar ataukah tidak (hoaks ataupun bukan) di jagat media daring (internet) menjadi alternatif aktual warga masyarakat dalam mempersepsikan dan menindakan diri di ruang publik maupun privat. Protokol medis (kesehatan) yang senantiasa disosialisasikan sebagai pengetahuan yang dianggap “benar” atau strategis tidak serta merta menjadi kebiasaan baru yang musti dilakukan dalam mengurangi paparan pandemi Covid-19 ini. Informasi benar ataupun hoaks di berbagai media baik daring maupun informasi langsung dari mulut ke mulut, baik dari pihak yang kompeten maupun tidak harus berada pada situasi yang

konsetatif. Ujung-ujungnya masyarakat memilih dan memilah sesuai dengan kapasitas pengetahuan yang mereka peroleh. Pemerintah melalui sejumlah pembenaran berupaya keras agar kebijakannya dapat diindahkan dan dipatuhi warga masyarakat melalui sejumlah pendisiplinan diri agar rangkaian penularan pandemi Covid-19 itu putus. Selain itu pemerintah pun baik pusat maupun daerah berjuang keras memberikan jaminan sosial kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung terutama kelompok masyarakat yang bergerak di sektor informal (penghasilan harian), dan yang terancam mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Bantuan diberikan melalui berbagai bentuk baik pangan maupun sarana alat penjagaan diri (*masker* dan *hand sanitizer*) sebagai konsekuensi pembatasan ruang gerak fisik warga masyarakat (*Physical Distancing* dan untuk tetap ada di rumah). Walau dalam tataran tertentu bagi sebagian kalangan pemberian bantuan ini telah menimbulkan keresahan tertentu mengingat ada kasus-kasus tertentu pemberian bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya.

Fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan hamparan tafsir melalui cara pandang yang beragam dari berbagai perspektif, salah satunya adalah dengan menggunakan perspektif kekuasaan Foucault ini. Melalui perspektif ini kita bisa lihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui beragam mekanisme dalam ruang interaksi yang dilihat secara horizontal. Ruang tafsir relasi kekuasaan terkait fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia memperlihatkan adanya tiga perhatian yang berbeda (relasi kekuasaan sebagai strategi, relasi kekuasaan *governmentality*, dan relasi kekuasaan dominasi). Ketiga model analisis bisa kita lihat dalam realitasnya. Terlepas dari itu semua satu hal yang pasti bahwa Covid-19 masih tetap mengincar kita, dan kita dituntut untuk “berdisiplin” dalam menerapkan langkah-langkah tindak medis (protokol medis) berdasarkan basis pengetahuan ilmiah yang dapat dipercaya.

Jalinan antaraktor yang berada pada jejaring kekuasaan sebagai pihak yang diposisikan terlibat menjadi perhatian utama dalam melihat situasi ini, yakni situasi di tengah pandemi Covid-19 yang entah kapan selesainya. Adanya saling percaya dari tiap-tiap pihak yang berada dalam situasi ini menjadi salah satu kunci dalam menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 tambah meluas. Kepatuhan yang diharapkan mewujud dalam keseharian dari masyarakat melalui taatnya terhadap prosedur atau protokol medis menjadi salah satu kunci utama terlepas dari beragam kebijakan yang muncul dari pemerintah. Pengetahuan terkait kesehatan menjadi penting untuk selalu ditindakan dalam berbagai kesempatan terlepas dari berbagai kepentingan yang menyertainya. Bijak dan bajik dalam mengkonsumsi informasi dan pengetahuan yang diperoleh menjadi strategi demi terjadinya percepatan pemutusan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Asmara, C., G. (2020, May, 27). Catat Daerah Ini Kemungkinan Segera Terapkan 'New Normal'. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200527151309-4-161255/catat-daerah-ini-kemungkinan-segera-terapkan-new-normal>
- 2) Aur, A. (2005). Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed). Teori-Teori Kebudayaan, (pp.145-162). Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- 3) Barthen, K. (2001). Filsafat Barat Kontemporer Prancis. Jakarta. Gramedia.
- 4) Dewi, R., K. (2020, April, 14). Mengenal Apa Itu PSBB, Aturan, Daerah yang Menerapkan hingga Sanksinya. [https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?%20\(14/04/2020,%2009.38%20WIB\)](https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/093800065/mengenal-apa-itu-psbb-aturan-daerah-yang-menerapkan-hingga-sanksinya?%20(14/04/2020,%2009.38%20WIB))
- 5) Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, m., S., Djalante, S., Rafliana, I., Surtiari, G., A., K., Warsilah, H. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, ELSEVIER. Vol 6, April 2020,100091. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>
- 6) Eriyanto. (2003). Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: Penerbit LKis.
- 7) Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 – 1977. ColinGordon ed. New York: Pantheon Books.
- 8) Foucault, M. (2002). Power/Knowledge-Wacana Kuasa/Pengetahuan", (terjemahan). Jogjakarta. Bentang Budaya.
- 9) Frank, A., W. (1998). Stories of Illnes as care of The Self : A Foucauldian Dialogue. Health, Vol 2, 2 : Published Sage Publications, Ltd. 329-348. https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Frank3/publication/239771821_Stories_of_Illness_as_Care_of_the_Self_A_Foucauldian_Dialogue/links/5a78e0be0f7e9b41dbd44110/Stories-of-Illness-as-Care-of-the-Self-A-Foucauldian-Dialogue.pdf
- 10) Handoko, T., Rfs, H.T., Ms, Z.H. dan Tampubolon, D. (2021). Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1). 1–16. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3174>
- 11) Hidayat, T. (2020, June 22). Indonesia Nomor Satu Kasus Covid di Asia Tenggara dan Kesembilan di Asia. <https://akvyat.com/seputartangsel.pikiran-r/nasional/pr-14574307/indonesia-nomor-satu-kasus-covid-di-asia-tenggara-dan-kesembilan-di-asia>
- 12) Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. Jurnal Al-Khitabah Vol 3. No 1 Juni 2017, Makassar. Universitas Islam Negeri Alaudin, 117 – 133. <http://journal.uin-alaudind.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/viewFile/2926/2802>
- 13) Margianto, H. (2020, May 27). New Normal di Indonesia Apa yang Akan Terjadi?. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/27/082007465/new-normal-di-indonesia-apa-yang-akan-terjadi?page=all>
- 14) Maring, P. (2010). Bagaimana Kekuasaan Bekerja, Dibalik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi?: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi. Jakarta. Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia
- 15) Mudhoffir, A., M. (2011). Governmentality dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo. Jurnal Sosiologi, Vol 16, No 1, Jakarta. LabSosio Universitas Indonesia, 49 – 75.

- 16) Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault. *Jurnal Thaqafiyat*, Vol 18, No 2 Desember 2017, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga, 186-200. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1316/797>
- 17) Safrizal, Z., A., Putra, D., I., Sofyan, S., Bimo. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- 18) Susanto, I. (2020, May 5). Relasi Kuasa Dalam Wacana Identitas. <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/irzanti.sutanto/publication/wacanaidentitas.pdf>
- 19) Umanailo, M.C.B. (2019, October). Pemikiran Michel Foucault. https://www.researchgate.net/publication/336764837_PEMIKIRAN_MICHEL_FOUCAULT
- 20) Wijaya, I., N. (2012). Relasi-Relasi Kekuasaan Di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali. *Jurnal Humaniora*. Volume 24 No. 2 Juni 2012, 141–155. <https://media.neliti.com/media/publications/11961-ID-relasi-relasi-kekuasaan-di-balik-pengelolaan-industri-pariwisata-bali.pdf>